



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI SOFIFI 2025-2029

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



RENCANA STRATEGIS

BALAI POM DI SOFIFI



 @bpom.sofifi

 Balai POM di Sofifi

 @bpomsofifi

 sofifi.pom.go.id

 @Bpom Sofifi

 Balai POM di Sofifi

 082220000538

 bpom_sofifi@pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024	5
1.3. Aspirasi Stakeholder	14
1.4. Potensi dan Permasalahan	16

BAB II VISI, MISI TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Badan POM	34
2.2 Misi Badan POM	35
2.3 Tujuan Organisasi	37
2.4 Sasaran Kegiatan	40



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	56
3.2 Strategi Balai POM di Sofifi	59

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja	65
4.2 Kerangka Pendanaan	69

BAB V	
PENUTUP	71

LAMPIRAN	72
-----------------	-----------



Daftar Tabel

1.1	Profil Pegawai Berdasarkan Proporsi	5
1.2	Capaian Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024	6
1.3	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai POM di Sofifi 2020-2024	18
1.4	Daftar Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholders	20
1.5	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Komponen Pengungkit	24
1.6	Data Jumlah Pengaduan/Pertanyaan Tahun 2024	25
1.7	Matriks Ringkasan Analisis SWOT	32
2.1	Matriks Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	39
2.2	Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Indikator	45
2.3	Matriks Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Sofifi	50
3.1	Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Sofifi Tahun 2025-2029	59
4.1	Target Kinerja Balai POM di Sofifi 2025-2029	65
4.2	Kerangka Pendanaan Balai POM di Sofifi 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan	69
4.3	Kerangka Alokasi berdasarkan Sumber Dana	70



Daftar Gambar

1.1	Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi	3
1.2	Peta Provinsi Maluku Utara	4
1.3	Tren Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024	10
1.4	Profil Pegawai Berdasarkan Usia	17
1.5	Penilaian IPP BPOM di Sofifi Tahun 2024 berdasarkan aspek	18
1.6	Data Analisis Beban Kerja (ABK) Balai POM di Sofifi	22
1.7	Nilai standar kompetensi pegawai Balai POM di Sofifi	23
1.8	Profil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Tahun 2024	28
1.9	Hasil Patroli Siber	29
2.1	Misi Presiden (Asta Cita)	35

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
NOMOR : HK.02.02.9B.11.25.116 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Sofifi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Sofifi memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Sofifi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Sofifi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Sofifi dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Sofifi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 05 Oktober 2025

KEPALA BALAI POM DI SOFIFI



ERMANTO SIAHAAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

NOMOR HK.02.02.9B.12.25.121 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2025-2029
BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam PerBPOM Nomor 3. Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rencana Strategis Balai POM di Sofifi untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rencana Strategis ini dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Sofifi untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Balai POM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

- 
-
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 5. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 8. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
 11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai POM di Sofifi telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya terdapat 2 pejabat yaitu pejabat administrator (Kepala Balai POM di Sofifi) dan pejabat pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, dibentuk

ketua tim dan anggota tim yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Ketua tim kerja Balai POM di Sofifi yang mengawal pencapaian 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi

Wilayah kerja Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km².



Gambar 1. 2 Peta Provinsi Maluku Utara

Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi mencakup 8 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kota Ternate
- b. Kota Tidore Kepulauan
- c. Kabupaten Halmahera Barat
- d. Kabupaten Halmahera Timur
- e. Kabupaten Halmahera Tengah
- f. Kabupaten Halmahera Selatan
- g. Kabupaten Kepulauan Sula
- h. Kabupaten Pulau Taliabu

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Maluku Utara pada akhir tahun 2023 mencapai 1.365.091 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 42 jiwa/km².

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan per Juni 2025 sejumlah 69 orang dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Profil Pegawai Berdasarkan Proporsi

PNS	PPPK	Tenaga Alih Daya	Total
47	11	11	69

Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, sebagai rangkaian dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai POM di Sofifi dengan kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029 menjadi cerminan wujud semangat dalam menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan berkualitas.

1.2 Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai POM di Sofifi. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1. 2 Capaian Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	80,8	88,89	110,01	89	85,3	98,5	90	100	111,11	91,00	95,11	104,52	95,2	98,24	103,19
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	78	89,29	114,47	89	89,55	100,62	90,5	100	110,50	92,00	88,89	96,62	93,5	100,00	106,95
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	81	93,55	115,49	95	92,44	97,30	95,5	100	104,71	96,00	90,68	94,46	96,5	98,17	101,73
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	80	75,76	94,70	82	95,45	116,41	84	97,56	116,14	86,00	78,38	91,14	90,46	100,00	110,55
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%				88	95	107,95	89	100	112,36	90,00	100,00	111,11	90	100,00	111,11
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Indeks	71	71,18	100,25	74	65,31	88,26	78	71,42	91,56	81,00	74,79	92,33	84	77,94	92,79
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Ineks	65	90,18	138,74	91,1	83,1	91,22	92,3	97	105,09	93,40	99,00	106	99,1	99,74	100,65



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	68	60,07	88,34	62,55	59,95	95,84	65,04	66,09	101,61	67,52	74,58	110,46	74,6	77,89	104,41
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	80	90,43	113,04	91	88,73	97,51	91,5	92,26	100,83	92,00	93,15	101,25	93,74	94,94	101,28
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	87	74,14	85,22	89	100	112,36	91	92,16	101,27	93,00	99,26	106,73	99,3	100,00	100,70
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	60,6	50,57	83,45	67	54,26	80,98	73	95,92	131,40	79,00	88,64	112,20	88,7	97,92	110,39
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	85	100	117,65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	120,00
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	46	42,86	93,17	55	46,51	84,57	60	64,29	107,14	65,00	73,81	113,55	73,9	75,76	102,52
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	55	59,48	108,14	60	72,25	120,42	63	63,68	101,08	66,00	73,06	110,69	73,1	79,60	108,89



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Nilai	3,11	3,86	124,12	4,03	4,22	104,71	4,2	4,12	98,10	4,38	4,64	105,94	4,7	4,72	100,43
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%							77	86,67	112,55	79,00	92,31	116,85	92,4	100,00	108,23
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	%	85,7	92,54	107,98	92,5	94,82	102,51	94,4	94,79	100,41	96,20	95,69	99,47	96,6	98,45	101,92
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah Sekolah	16	16	100	40	40	100	54	54	100	68,00	68,00	100	82	82,00	100,00
	Jumlah desa pangan aman	Jumlah Desa	4	4	100	12	12	100	18	18	100	25,00	25,00	100	31	31,00	100,00
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Jumlah Pasar	2	2	100	4	4	100	6	6	100	8,00	8,00	100	10	10,00	100,00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	83	65,09	78,42	100	55,93	55,93	100	67,59	67,59	100,00	84,73	84,73	100	98,63	98,63
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	89	71,77	80,64	100	45,59	45,59	100	80	80	100,00	69,68	69,68	100	97,59	97,59



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	40	55	137,50	55	50	90,90	58	100	172,41	62,00	92,50	149,19	93	88,75	95,43
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	%	85	61,91	72,84	70,3	70,26	99,94	72,3	82,31	113,85	74,30	85,13	114,58	85	84,69	99,64
	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	%	80	71,99	89,99	74,5	74,78	100,38	77	71,25	92,53	79,50	71,74	90,24	75,97	78,67	103,55
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	Indeks	75	83,28	111,04	84	81,69	97,25	85,5	82,42	96,40	86,00	90,91	105,71	88,1	86,86	98,59
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	50	30,8	61,60	36	38,9	108,06	41	36,30	88,54	46,00	51,53	112,02	52,83	63,31	119,84
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks	1,51	1,45	96,03	2	1,9	95	2,25	2,9	128,89	2,50	3,00	120	3	3,00	120,00
Terkelolanya keuangan Balai POM di Sofifi secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	%	93	89,02	95,72	93,8	88,88	94,75	94,4	90,95	96,35	95,60	88,19	92,25	86,59	93,26	107,70
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi	%	92	100	108,70	93	100	107,53									

Selama periode Renstra 2020-2024, nilai kinerja organisasi Balai POM di Sofifi bergerak secara fluktuatif dikarenakan pada periode 2020-2021 terdapat penyesuaian indikator kinerja. Meskipun demikian, Balai POM di Sofifi berupaya meningkatkan kinerjanya, hal tersebut tergambar pada grafik berikut yang mana terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2022 hingga 2024



Gambar 1. 3 Tren Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Kupang mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai POM di Sofifi menggunakan pendekatan **metode *Balanced Scorecard (BSC)*** yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Balai POM di Sofifi memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2020-2024 Balai POM di Sofifi melalui pendekatan *Trend Analysis*. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi

- Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 132,08 dengan kategori Meningkat (*on the track*)

-
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar -12,91 dengan kategori Menurun
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perkembangan kinerja sebesar -132,61 dengan kategori Menurun
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perkembangan kinerja sebesar 25,14 dengan kategori Meningkatkan (Moderat)
 - Persentase Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Pengukuran dengan perkembangan kinerja sebesar -145,45 berada dalam kategori Menurun

2. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja yaitu indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan perkembangan kinerja sebesar 39,34 berada dalam kategori Meningkatkan (*Moderat*)

3. Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 132,41 dengan kategori Meningkatkan (*On The Track*);
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 134,38 berada dalam kategori Meningkatkan (*On The Track*);
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan perkembangan kinerja sebesar 109,96 berada dalam Meningkatkan (*On The Track*).

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan perkembangan kinerja sebesar 134,79 berada dalam kategori Meningkatkan (*On The Track*);

- Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan perkembangan kinerja sebesar 136,40 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan perkembangan kinerja sebesar 0 berada dalam kategori (stagnan);
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 136,14 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 134,13 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Indeks Pelayanan Publik dengan perkembangan kinerja sebesar 125,40 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan perkembangan kinerja sebesar 200,06 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan perkembangan kinerja stagnan dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2024

5. Sasaran Kegiatan 5 “Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 103,96 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan perkembangan kinerja sebesar 106,65 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*);
- Jumlah desa pangan aman dengan perkembangan kinerja sebesar 68,12 berada dalam kategori Meningkat (*Moderat*);
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan perkembangan kinerja sebesar 35,40 berada dalam kategori Meningkat (*Moderat*)

6. Sasaran Kegiatan 6 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Sofifi” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan perkembangan kinerja sebesar 81,08 berada dalam kategori Meningkatkan (*Moderat*);
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan perkembangan kinerja sebesar -11,34 berada dalam kategori Menurun

7. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi” terdapat indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 134,84 berada dalam kategori Meningkatkan (*On The Track*).

8. Sasaran Kegiatan 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Indeks RB Balai POM di Sofifi dengan perkembangan kinerja sebesar 135,82 berada dalam kategori Meningkatkan (*On The Track*);
- Nilai AKIP Balai POM di Sofifi dengan perkembangan kinerja sebesar -8,56 berada dalam kategori Menurun;
- Nilai Kearsipan Balai POM di Sofifi dengan perkembangan kinerja stagnan dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2024

9. Sasaran Kegiatan 9 “Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal” terdapat indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi dengan perkembangan kinerja sebesar 126,76 berada dalam kategori Meningkatkan (*On The Track*).

10. Sasaran Kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan perkembangan kinerja sebagai berikut:

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan perkembangan kinerja sebesar 62,28 berada dalam kategori Meningkatkan (*Moderat*);

-
- Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal dengan perkembangan kinerja sebesar 137,58 berada dalam kategori Meningkat (*On The Track*).

11. Sasaran Kegiatan 11 “Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel” terdapat indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi dengan perkembangan kinerja sebesar 45,21 berada dalam kategori Meningkat (*Moderat*).

1.3 Aspirasi Stakeholder

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian bersama berbagai pihak karena menyangkut langsung dengan kesehatan masyarakat serta keberlangsungan usaha mikro dan menengah. Dalam berbagai forum koordinasi, sosialisasi, maupun dialog lintas sektor, sejumlah aspirasi disampaikan oleh para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

Dari sisi pemerintah daerah, aspirasi utama yang muncul adalah perlunya penguatan sinergi antara Balai POM di Sofifi, Dinas Kesehatan, serta dinas teknis lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah daerah menilai bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium, serta infrastruktur pendukung, terutama di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap adanya dukungan peningkatan kapasitas serta pembentukan regulasi daerah yang lebih operasional, seperti peraturan gubernur atau peraturan daerah yang dapat memperkuat dasar hukum pengawasan. Sementara itu, pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyampaikan kebutuhan akan pendampingan teknis dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPOM dan instansi terkait. Banyak UMKM di Maluku Utara yang bergerak di bidang pangan olahan tradisional serta Obat Bahan Alam, tetapi belum memahami sepenuhnya standar keamanan maupun prosedur perizinan edar. Mereka berharap adanya penyederhanaan proses perizinan, bimbingan teknis yang mudah dijangkau, serta ketersediaan informasi yang jelas mengenai syarat legalitas produk. Dari kalangan masyarakat dan konsumen, aspirasi yang paling kuat adalah keinginan agar pengawasan dilakukan secara merata hingga ke pelosok daerah dan pulau-

pulau terluar, seperti Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Masyarakat mengharapkan peningkatan kegiatan edukasi publik mengenai bahaya obat ilegal, kosmetik berbahaya, dan makanan tanpa izin edar. Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya saluran pengaduan yang cepat, mudah diakses, dan ditindaklanjuti secara nyata apabila ditemukan produk mencurigakan di pasaran.

Dari unsur akademisi dan tenaga kesehatan, muncul dorongan untuk memperkuat kerja sama riset antara perguruan tinggi, seperti Universitas Khairun, dengan BPOM dan pemerintah daerah. Penelitian di bidang keamanan pangan lokal dan obat tradisional perlu didukung agar produk-produk khas Maluku Utara dapat berkembang dengan tetap memenuhi aspek keamanan dan mutu. Selain itu, mereka menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga farmasi dan analis pangan melalui pelatihan dan sertifikasi berstandar nasional.

Sementara itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih kuat dalam penanganan kasus pelanggaran kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Mereka berharap proses hukum dapat dipercepat melalui penyediaan bukti laboratorium yang valid dan cepat dari BPOM, serta adanya mekanisme komunikasi terpadu dalam penyelidikan dan penegakan hukum.

Secara umum, seluruh stakeholder menyadari bahwa kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Keterbatasan fasilitas pengujian laboratorium dan jumlah tenaga pengawas juga memperlambat respon terhadap laporan di lapangan. Untuk itu, mereka berharap adanya pengembangan unit layanan BPOM yang lebih kuat di daerah, peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan pemantauan, serta dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Sebagai penutup, para stakeholder sepakat bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Maluku Utara tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas, koordinasi, dan edukasi berkelanjutan, diharapkan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan di Maluku Utara dapat semakin terjamin,

sehingga masyarakat terlindungi dan pelaku usaha lokal dapat berkembang secara sehat dan berdaya saing.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Sofifi dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Sofifi perlu melakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Balai POM di Sofifi menggunakan pendekatan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi periode 2025-2029. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek **kekuatan (*strength*)**, **kelemahan (*weakness*)**, **peluang (*opportunities*)** dan **tantangan (*threats*)** yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam penjabaran berikut:

Kekuatan (*Strength*)

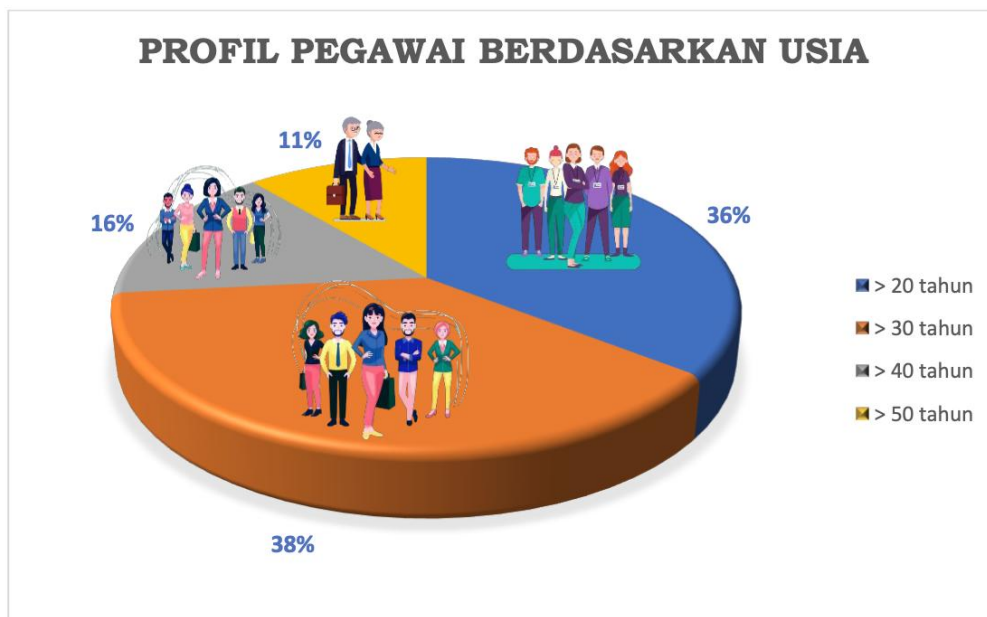
1. Memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan secara komprehensif meliputi pre dan post market:

Balai POM di Sofifi memiliki mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-penyalaran (*pre-market*) hingga pasca-peredaran (*post-market*). Kewenangan ini memberikan posisi strategis bagi Balai POM di Sofifi untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk sejak dari proses produksi hingga

dikonsumsi masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan pengawasan.

2. Regenerasi SDM:

Tersedianya proses regenerasi sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Melalui mekanisme rotasi, mutasi, dan pengembangan kompetensi, Balai POM di Sofifi dapat memastikan bahwa pegawai yang ada memiliki kemampuan teknis, analitis, dan manajerial yang sesuai dengan tantangan pengawasan di masa depan. Usia Pegawai Balai POM di Sofifi didominasi oleh generasi muda sebanyak 16 orang pegawai memiliki umur diatas 20 tahun, 17 orang memiliki umur diatas 30 tahun, 7 orang memiliki umur diatas 40 tahun dan 5 orang diatas 50 tahun.



Gambar 1. 4 Profil Pegawai Berdasarkan Usia

3. Dukungan anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana:

Balai POM di Sofifi memperoleh dukungan anggaran yang cukup untuk menunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional, seperti peralatan laboratorium, kendaraan dinas, serta fasilitas teknologi informasi. Ketersediaan anggaran ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelayanan publik, serta edukasi masyarakat berjalan efektif dan berkesinambungan. Pada periode 2020-2024 Balai POM di Sofifi mengelola anggaran sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
2020	10.723.420.000	10.513.194.476	98,04%
2021	14.207.826.000	14.175.366.081	99,77%
2022	17.129.458.000	17.121.991.838	99,96%
2023	20.985.888.000	20.931.083.580	99,74%
2024	17.644.182.000	17.608.784.692	99,80%

4. Kualitas pelayanan publik yang telah mengacu pada standar pelayanan publik:

Melalui Kepka BPOM No 80 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM telah memuat aspek-aspek penilaian, Pelayanan publik Balai POM di Sofifi telah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip standar pelayanan publik yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut.

Lembar Penilaian Kinerja				
Data Tahun 2024				
Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
P02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	4,93
	II	Profesionalisme SDM	25%	4,5
	III	Sarana Prasarana	18%	5
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,7
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	4,5
	VI	Inovasi	12%	4,5
Indeks Formulir P02			4,72	
P03	Indeks Formulir P03			4,7357142857143
Indeks Pelayanan Publik			4,72	

Gambar 1. 5 Penilaian IPP BPOM di Sofifi Tahun 2024 berdasarkan aspek

Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

5. Komitmen seluruh ASN dalam menerapkan Reformasi Birokrasi:

Pegawai di Balai POM di Sofifi memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan integritas, profesionalisme, dan budaya kerja yang berorientasi hasil. Komitmen ini memperkuat tata kelola organisasi agar semakin efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pengawasan serta pelayanan publik.

6. Pengembangan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Balai POM di Sofifi telah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, pelaporan, dan pemantauan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi ini meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat sistem informasi pengawasan berbasis data, serta mendukung pelaksanaan transformasi digital di lingkungan BPOM melalui subsite <https://sofifi.pom.go.id> yg telah memuat data dan informasi aplikasi internal BPOM.

7. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam kerangka *Criminal Justice System*:

Balai POM di Sofifi menjalin hubungan kerja yang kuat dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dalam penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kolaborasi dalam kerangka *Criminal Justice System* ini memperkuat efektivitas penindakan terhadap pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.

8. Kerja sama lintas sektor meliputi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Media dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Balai POM di Sofifi aktif membangun jejaring dan sinergi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah mendukung integrasi kebijakan pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi memperkuat basis ilmiah dan riset pengawasan, sedangkan kemitraan dengan media membantu memperluas edukasi publik mengenai keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Daftar Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholders

Mitra Kerja Sama	Tahun Penandatanganan	Tahun Berakhir	Judul Kerja Sama
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara	2022	2027	Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan Serta Mutu Obat dan Makanan
KPID Provinsi Maluku Utara	2023	2028	Pengawasan Isi Siaran di Bidang Obat dan Makanan
Universitas Khairun Kota Ternate	2023	2028	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Kota Ternate	2023	2028	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Poltekkes Kemenkes Kota Ternate	2023	2026	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Peralatan laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sebagai penunjang kegiatan pengawasan:

Laboratorium Balai POM di Sofifi telah terakreditasi ISO 17025, yang menandakan bahwa sistem manajemen mutu dan kompetensi teknis pengujian memenuhi standar internasional. Akreditasi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pengujian laboratorium, memperkuat kredibilitas lembaga, serta menjamin keandalan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan pengawasan. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan masing-masing parameter pengujian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian laboratorium Balai POM di Sofifi sebesar 70,02% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemenuhan standar ruang lingkup pengujian di laboratorium Balai POM Sofifi telah mencapai tingkat optimal, dengan syarat minimal SRL > 65%.

Kelemahan (*Weakness*)

1. Kelembagaan yang belum maksimal dikarenakan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang belum disahkan:

Belum disahkannya peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menyebabkan fungsi kelembagaan Balai POM di Sofifi belum berjalan optimal. Ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk beberapa aspek teknis membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan terkadang menghadapi keterbatasan dalam hal penegakan dan koordinasi lintas sektor.

2. Pengelolaan database yang belum terintegrasi secara maksimal dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Sistem pengelolaan data dan informasi pengawasan di Balai POM di Sofifi belum sepenuhnya terintegrasi antarunit maupun dengan sistem pusat, sehingga masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data, pelaporan, serta analisis berbasis bukti. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan dan pemetaan risiko dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Pemberian informasi dan KIE yang dilakukan Balai POM di Sofifi masih belum menjangkau secara maksimal ke wilayah pengawasan:

Kondisi Geografis dimana Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan yang sebagian besar *catchment area* adalah kepulauan dimana masyarakatnya sebagian besar belum banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung menjadi metode yang lebih efektif diterapkan di Provinsi Maluku Utara, apalagi jika melibatkan organisasi, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Karena itu Balai POM di Sofifi dalam pelaksanaan KIE melibatkan lintas sektor terkait. Balai POM di Sofifi telah melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di seluruh Kabupaten/Kota namun dengan jumlah peserta yang terbatas. Dengan adanya Pandemi Covid-19 serta kebijakan *refocusing* anggaran dimana metode pertemuan langsung sejak tahun 2020 dibatasi dan dialihkan ke daring hal ini memberikan dampak pada pelaksanaan KIE di Provinsi Maluku Utara. KIE pada saat pandemik lebih banyak

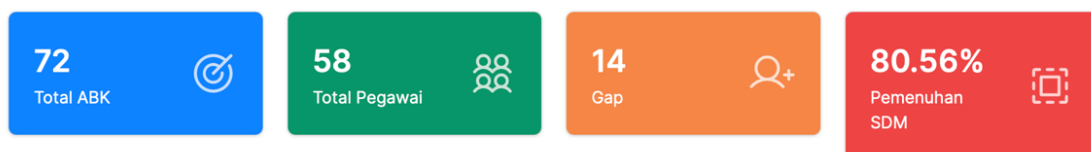
menggunakan metode daring yang hanya bisa dijangkau oleh beberapa Kabupaten/Kota tertentu saja seperti Kota Ternate yang memiliki sarana prasarana dan kemampuan masyarakat untuk mengakses kegiatan melalui jaringan internet yang lebih baik daripada 8 Kabupaten/Kota lainnya.

4. Balai POM di Sofifi belum dikenali secara luas oleh masyarakat Maluku Utara:

Tingkat visibilitas dan pengenalan Balai POM di Sofifi di tengah masyarakat Maluku Utara masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas fungsi, peran, dan layanan yang diberikan oleh Balai POM, terutama di luar wilayah ibu kota provinsi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, pengaduan, maupun pengawasan bersama terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja (ABK):

Berdasarkan hasil analisis beban kerja, jumlah pegawai di Balai POM di Sofifi masih belum mencukupi untuk mengimbangi volume kegiatan pengawasan yang luas dan kompleks. Keterbatasan jumlah SDM menyebabkan beban kerja tinggi pada personel yang ada, sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas serta kualitas layanan publik. Berikut adalah data pemenuhan Analisis Beban Kerja (ABK) Balai POM di Sofifi sampai dengan Tahun 2024.



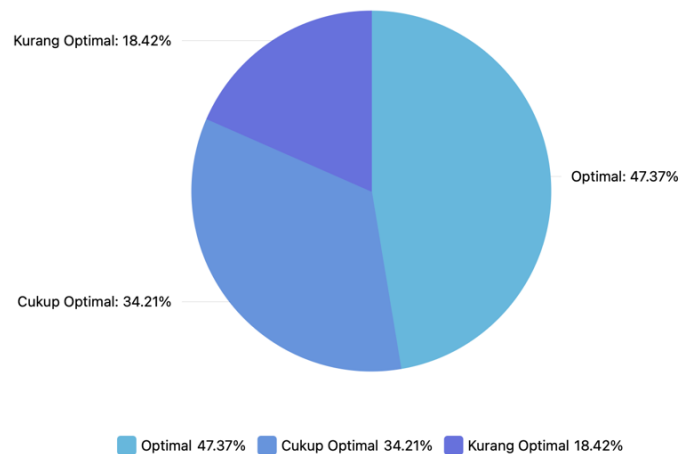
Gambar 1. 6 Data Analisis Beban Kerja (ABK) Balai POM di Sofifi

6. Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dengan kondisi lingkungan yang dinamis:

Selain jumlah yang terbatas, kompetensi SDM di Balai POM di Sofifi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi, kemajuan teknologi, dan dinamika pengawasan berbasis digital. Penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis, pengembangan analisis risiko, dan adaptasi terhadap sistem informasi modern menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga mampu merespons tantangan pengawasan secara efektif. Sebanyak 58 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial

kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017.

Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Sofifi yang optimal sebesar 47,37%, cukup optimal sebesar 34,21%, dan kurang optimal sebesar 18,42%.



Gambar 1. 7 sebaran nilai standar kompetensi pegawai Balai POM di Sofifi berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB No 38 Tahun 2017

7. Belum mendapatkan predikat WBK dan WBBM:

Balai POM di Sofifi hingga saat ini belum memperoleh predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** maupun **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas masih perlu ditingkatkan, baik dalam aspek penguatan budaya kerja berintegritas, pelayanan prima, maupun inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Hasil evaluasi PMPZI tahun 2025 menunjukkan masih terdapat penilaian pada komponen pengungkit khususnya Pokja Tatalaksana yg masih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), selain itu masih terdapat tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP yang masih belum sesuai saran.

Tabel 1. 5 Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Komponen Pengungkit

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A,	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,80	3,11	5,91	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,71	2,42	4,13	TMS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,21	4,25	8,46	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,59	3,46	7,05	MS
PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,97	6,87	12,84	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,09	2,93	7,02	MS
TOTAL PENGUNGKIT						45,41	

8. Lokasi kantor yang berada di wilayah administrasi Sofifi sehingga akses masyarakat terhadap layanan masih terbatas:

Letak Balai POM di Sofifi yang berada di wilayah administratif ibu kota provinsi namun dengan akses transportasi yang terbatas membuat sebagian masyarakat Maluku Utara, terutama dari kabupaten dan kepulauan, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pengaduan dan konsultasi langsung. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan layanan dan pengawasan di seluruh wilayah provinsi. Berdasarkan data jumlah pengaduan/pertanyaan Balai POM di Sofifi Tahun 2024, hanya terdapat 6 kunjungan langsung dalam periode 1 tahun.

Tabel 1. 6 Data Jumlah Pengaduan/Pertanyaan Tahun 2024

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai POM di Sofifi		0	2	1	2	0	2	0	0	2	0	1	1	11
1.	Langsung	Kantor Balai POM di Sofifi, Jl. Pemuda No. 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3
2.	Telepon	082220000538	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.	Fax	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Kantor Balai POM di Sofifi, Jl. Pemuda No. 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	bpom_sofifi@pom.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SMS	082220000538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Media Sosial	Instagram: @bpom.sofifi Facebook: Balai POM di Sofifi X: @Bpom Sofifi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kotak Saran	Kantor Balai POM di Sofifi, Jl. Pemuda No. 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Whatsapp	082220000538	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	7
10.	Aplikasi lain	Subsite: sofifi.pom.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	2	1	2	0	2	0	0	2	0	1	1	11

Peluang (*Opportunity*)

1. Dukungan Stakeholders terhadap tugas dan fungsi Balai POM di Sofifi:

Balai POM di Sofifi memiliki peluang besar melalui adanya dukungan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, maupun lembaga pendidikan dan media. Dukungan ini memperkuat legitimasi pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta membuka ruang kolaborasi strategis dalam edukasi publik, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. Sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan di wilayah Maluku Utara.

2. Pemanfaatan media sosial yang mempermudah penyebaran informasi terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial di masyarakat menjadi peluang bagi Balai POM di Sofifi untuk memperkuat komunikasi publik dan penyebaran informasi pengawasan. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), penyampaian peringatan publik, serta kampanye keamanan pangan

dan sediaan farmasi secara cepat dan luas. Dengan strategi komunikasi digital yang tepat, Balai POM di Sofifi dapat meningkatkan transparansi, interaksi dengan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga.

3. Peran BPOM dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs) – Point 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta Point 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:

Keterlibatan BPOM dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) membuka peluang bagi Balai POM di Sofifi untuk memperkuat relevansi dan kontribusi institusionalnya terhadap agenda pembangunan nasional. Melalui pengawasan obat, kosmetik, pangan, dan suplemen kesehatan, Balai POM di Sofifi berperan langsung dalam mendukung *SDG Point 3 (Good Health and Well-being)* dengan memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Selain itu, penerapan prinsip *Point 12 (Responsible Consumption and Production)* memberikan peluang untuk mendorong pelaku industri lokal menerapkan praktik produksi yang etis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

4. Pengawasan sediaan farmasi dan makanan masuk dalam agenda pembangunan Transformasi Sosial melalui program Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan:

Adanya program nasional dalam agenda Transformasi Sosial yang menekankan Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Sofifi untuk memperkuat posisi dan perannya dalam pembangunan kesehatan di daerah. Program ini memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sarana pengawasan, serta penguatan sistem laboratorium dan jaringan pengawasan lintas wilayah. Dengan dukungan kebijakan tersebut, Balai POM di Sofifi berpotensi menjadi mitra utama dalam memperkuat sistem kesehatan nasional yang tangguh dan responsif terhadap risiko keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tantangan (Threats)

1. Faktor Geografis wilayah Maluku Utara yaitu kepulauan sehingga beberapa wilayah pengawasan sulit untuk dijangkau:

Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan utama bagi Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara

menyeluruh. Akses transportasi yang terbatas dan kondisi cuaca yang sering berubah menghambat pelaksanaan kegiatan inspeksi, sampling, serta edukasi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pengawasan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga membuka celah bagi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

2. Pembangunan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi yang belum jelas dan berjalan lambat sehingga menghambat koordinasi lintas sektor:

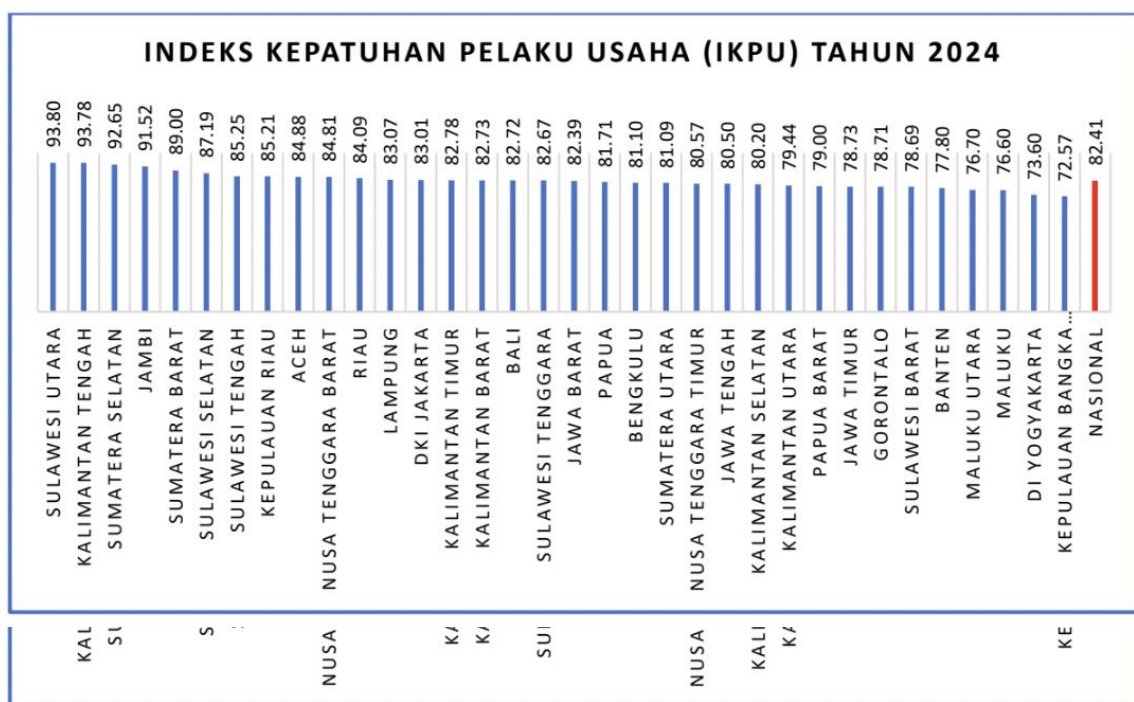
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di Kota Sofifi berdampak pada efektivitas koordinasi lintas sektor antarinstansi. Kondisi ini menyulitkan Balai POM di Sofifi yang berkantor di Sofifi dalam menjalin sinergi dengan lembaga pemerintah daerah maupun mitra strategis lainnya yang sebagian besar masih beroperasi di luar Sofifi. Akibatnya, efisiensi komunikasi, kolaborasi program, dan pelaksanaan kegiatan bersama menjadi kurang maksimal.

3. Penjualan produk sediaan farmasi dan makanan secara online yang semakin masif: Maraknya perdagangan elektronik (*e-commerce*) menghadirkan tantangan besar bagi Balai POM di Sofifi dalam memastikan keamanan dan legalitas produk yang beredar di *platform digital*. Mekanisme distribusi daring yang lintas daerah dan sulit dilacak menyebabkan pengawasan menjadi lebih kompleks. Kondisi ini meningkatkan risiko peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar, serta memerlukan strategi pengawasan siber yang lebih adaptif dan inovatif.

4. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan produksi dan distribusi produk sediaan farmasi dan makanan:

Rendahnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan Sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi ancaman bagi efektivitas pengawasan. Pelaku usaha kecil menengah (UMKM) sering kali menghadapi keterbatasan pemahaman regulasi sumber daya dan fasilitas produksi yang sesuai standar. Hal ini berpotensi menimbulkan peredaran produk yang tidak aman dan mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap produk lokal. Rendahnya Tingkat kesadaran dan kepatuhan Sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi ancaman bagi efektivitas pengawasan.

Pelaku usaha kecil menengah (UMKM) sering kali menghadapi keterbatasan pemahaman regulasi, sumber daya, dan fasilitas produksi yang sesuai standar. Hal ini berpotensi menimbulkan peredaran produk yang tidak aman dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Sejak Tahun 2021 Balai POM di Sofifi dengan inovasi GAMALAMA UTAMA (Gerakan bersama melayani Masyarakat UMKM Tambah Maju) telah berpartisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha serta melakukan pendampingan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) akan tetapi Balai POM di Sofifi masih perlu memperluas jangkauan dikarenakan berdasarkan Capaian indeks kepatuhan pelaku usaha tahun 2024, Provinsi Maluku Utara masih dibawah rata-rata nasional dengan perolehan 76,70%.



Gambar 1. 8 Profil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Tahun 2024

5. Kejahatan siber yang semakin marak seiring perkembangan teknologi:

Meningkatnya kasus kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan data dan penipuan berbasis daring, menjadi tantangan serius bagi Balai POM di Sofifi dalam menjaga keamanan sistem informasi pengawasan. Ancaman ini juga berkaitan dengan risiko penyebaran informasi palsu (hoaks) mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan, yang dapat menimbulkan kepanikan publik serta menurunkan kredibilitas lembaga jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil terbaru Patroli Siber tahun 2024 dilakukan patroli siber terhadap akun/link yang mengedarkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan tanpa izin edar, tanpa kewenangan, dan lain sebagainya pada berbagai media sosial, sebanyak 141 link/tautan yang direkomendasikan oleh Petugas Balai POM di Sofifi, dengan total link/tautan yang berhasil ter-take down adalah 120 link/tautan (85,11%).



Gambar 1. 9 Hasil Patroli Siber

6. Perilaku masyarakat yang dinamis dalam konsumsi produk sediaan farmasi dan makanan: Pola konsumsi masyarakat yang cepat berubah seiring tren gaya hidup, media sosial, dan promosi digital menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang lebih tertarik pada produk viral atau klaim manfaat instan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan legalitas. Perubahan perilaku ini menuntut Balai POM di Sofifi untuk terus meningkatkan edukasi publik serta memperkuat literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu.

7. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR):

Resistensi antimikroba merupakan ancaman nyata yang saat ini kita hadapi dan juga merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Penyalahgunaan dan penggunaan antimikroba yang berlebihan pada manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi pendorong utama berkembangnya patogen resisten terhadap obat. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara

lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah. Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *one health* bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba. Balai POM di Sofifi sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Berdasarkan data hasil pengawasan Balai POM di Sofifi tahun 2024, terkecuali Kota Ternate yang telah menerbitkan surat edaran hampir seluruh apotek di kabupaten/kota melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang bahaya resistensi antibiotik sehingga resistensi antibiotic sulit untuk dikendalikan. Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan upaya-upaya nyata dalam mengendalikan resistensi antimikroba yaitu dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran/ pengetahuan dan koordinasi lintas sektor terkait upaya pengendalian AMR, melaksanakan penertiban peredaran antibiotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang digunakan secara beririsan antara sektor manusia dan sektor hewan melalui kegiatan pemeriksaan bersama (*joint inspection*) dan melaksanakan pengujian terkait anti mikroba di obat dan makanan.

Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

8. Kebijakan hilirisasi yang memicu pertumbuhan industri pertambangan dan berdampak pada kondisi sosioekonomi masyarakat:

Peningkatan aktivitas industri pertambangan akibat kebijakan hilirisasi di Maluku Utara membawa dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk perubahan pola konsumsi, migrasi penduduk, dan risiko pencemaran lingkungan. Situasi ini dapat memengaruhi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah industri. Oleh karena itu, Balai POM di Sofifi perlu beradaptasi dengan memperkuat pengawasan terhadap potensi kontaminasi lingkungan yang berdampak pada rantai produksi pangan olahan dan sediaan farmasi yang dimana hingga tahun 2024, data menunjukkan terdapat sekitar 108 hingga 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi atau terdaftar di Maluku Utara, meskipun angka pastinya terus berfluktuasi karena adanya penertiban dan pencabutan izin.

Tabel 1. 7 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
- Memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan secara komprehensif meliputi pre dan post market - Regenerasi SDM - Dukungan anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana - Kualitas pelayanan publik yang telah mengacu standar pelayanan publik - Komitmen seluruh ASN dalam menerapkan Reformasi Birokrasi - Pengembangan Aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan - Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam kerangka Criminal Justice System - Kerja sama lintas sektor meliputi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Media dalam rangka mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan - Peralatan laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sebagai penunjang kegiatan pengawasan	- Kelembagaan yang belum maksimal dikarenakan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang belum disahkan - Pengelolaan database yang belum terintegrasi secara maksimal dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan - Pemberian Informasi dan KIE yang dilakukan Balai POM di Sofifi masih belum menjangkau secara maksimal ke wilayah pengawasan - Belum dikenali secara luas oleh masyarakat Maluku Utara - Jumlah SDM yang belum memenuhi Analisis Beban Kerja - Kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dengan kondisi lingkungan yang dinamis - Belum mendapatkan predikat WBK dan WBBM - Lokasi Kantor yang berada di wilayah Administrasi Sofifi sehingga jumlah masyarakat dalam mengakses layanan dan pengaduan langsung

Opportunity 1. Dukungan Stakeholders terhadap tugas dan fungsi Balai POM di Sofifi 2. Pemanfaatan Media Sosial yang mempermudah penyebaran informasi terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 3. Peran BPOM dalam Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Poin 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan Poin 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab 4. Pengawasan sediaan farmasi dan makanan masuk dalam agenda pembangunan Transformasi sosial dengan program pembangunan yaitu Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan.	Threats 1. Faktor Geografis wilayah Maluku Utara yaitu kepulauan sehingga beberapa wilayah pengawasan sulit untuk dijangkau 2. Pembangunan Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi yang belum jelas dan lambat sehingga menghambat koordinasi antar lintas sektor 3. Penjualan produk sediaan farmasi dan makanan secara online semakin masif 4. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan produksi dan distribusi produk sediaan farmasi dan makanan 5. Kejahatan <i>Cyber</i> semakin marak dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih 6. Perilaku masyarakat yang dinamis dalam hal konsumsi produk sediaan farmasi dan makanan 7. Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance / AMR) 8. Kebijakan hilirisasi yang memicu pertumbuhan industri pertambangan dan berdampak pada kondisi sosioekonomi masyarakat
--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Balai POM di Sofifi sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara komprehensif di wilayah Provinsi Maluku Utara, mencakup kegiatan pengawasan *pre-market* dan *post-market*, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pelaku usaha untuk memastikan produk yang beredar aman, berkhasiat, dan bermutu. Sebagai bagian dari struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai POM di Sofifi berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di tingkat daerah. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025–2029, yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

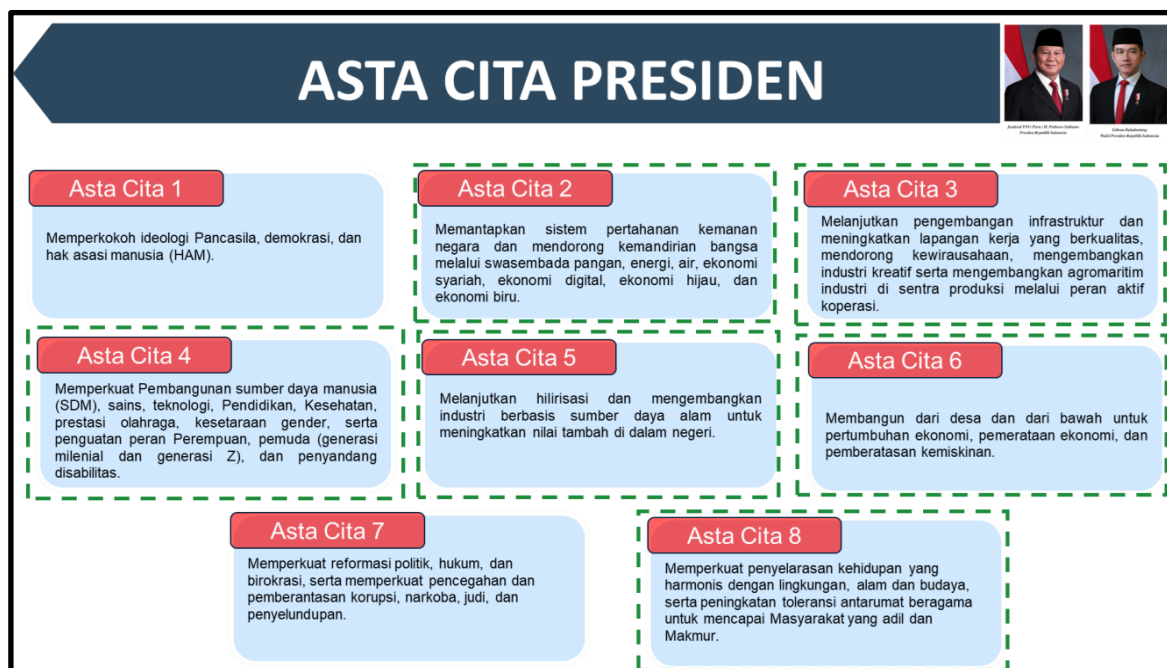
Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
 4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.
- Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi BPOM

BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

B POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian B POM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, B POM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi B POM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. B POM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

B POM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif B POM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Sofifi sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh misi BPOM tersebut melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik di wilayah kerja Maluku Utara.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah

tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, pendidikan konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Matriks Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Sofifi, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Sofifi akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Sofifi berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai POM di Sofifi berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk

memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Sofifi
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai POM di Sofifi harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Balai POM di Sofifi berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai POM di Sofifi berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai

prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, Balai POM di Sofifi mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Sofifi berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai POM di Sofifi merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi
2. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
4. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi



Tabel 2. 2 Matriks Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Indikator

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM di Sofifi
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja <i>Balai POM di Sofifi</i> <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>



Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM di Sofifi
			7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Sofifi</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan</i>



Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM di Sofifi
			<i>olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan</i>



Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM di Sofifi
			<i>Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i>



Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045			
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BPOM di Sofifi
	<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi 2. Nilai AKIP Balai POM di Sofifi 3. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi 4. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Balai POM di Sofifi 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis Balai POM di Sofifi sebagaimana tercantum:

Tabel 2. 3 Matriks Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Sofifi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Kerusakan alat, ketidakterediaan reagen dan sparepart yang dibutuhkan untuk pengujian sampel	1. Melakukan pengadaan di awal tahun untuk menghindari keterlambatan 2. Perbaiki alat sesuai dengan prioritas pengujian 3. Pengajuan penambahan anggaran	Fungsi Pengujian dan Tata Usaha
2	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Sarana pelayanan kesehatan yang telah mengikuti Bimtek KTD/ESO tidak menyampaikan laporan kepada BPOM di Sofifi	Koordinasi dengan stakeholder	Fungsi KIE
3	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pengambilan sampel tidak sesuai renlak	Monev realisasi sampel antara petugas penyampling dan penguji	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Keterlambatan penyampaian rekomendasi hasil pengawasan	Monev penyusunan hasil pemeriksaan sarana	Fungsi Pemeriksaan
5	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Kurangnya kompetensi petugas yang melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi	Diseminasi hasil pelatihan	Fungsi Pemeriksaan
6	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	CAPA tidak dikirimkan oleh pelaku usaha sesuai batas waktu yang telah ditentukan	Pemberian reminder kepada pelaku usaha, desk jempit bola kepada pelaku usaha	Fungsi Pemeriksaan
7	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Instrumen yang dapat diadakan setiap tahun terbatas jumlah dan jenisnya	Pengadaan instrumen sesuai dengan anggaran yang tersedia dan sesuai prioritas kebutuhan	Fungsi Pengujian
8	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pemenuhan standar kompetensi petugas pengujian belum merata	1. Diseminasi pelatihan 2. Pembelajaran mandiri melalui IDEAS	Fungsi Pengujian
9	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pemenuhan standar ruang lingkup terbatas	Pengujian sampel rutin sesuai dengan pedoman sampling, koordinasi dengan tim penyampling untuk pengambilan sampel yang belum pernah diuji	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
10	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Belum semua metode analisis yang digunakan sudah terverifikasi	1. Pembuatan roadmap verifikasi tahunan 2. Melakukan verifikasi bersamaan dengan pengujian rutin	Fungsi Pengujian
11	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pedoman Teknis Laboratorium (PTL) belum mencantumkan sistem pelaporan hasil uji sampel Balai POM Sofifi yang juga diinput di Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)	Melakukan Kaji Ulang dokumen PTL dan dokumen manajemen mutu secara berkala	Fungsi Pengujian
12	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Buku riwayat pemakaian alat (logbook) belum diisi secara rutin	Pembuatan prosedur yang mengatur bahwa wajib dilakukan monitoring riwayat pemakaian alat oleh penanggung jawab secara berkala dan memastikan kepatuhan setiap personel dalam pengisiannya.	Fungsi Pengujian
13	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Hasil uji tidak objektif	1. Semua personil pengujian menandatangani Pakta Integritas dan Pakta Independensi 2. Semua personil pengujian membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan	Fungsi Pengujian
14	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pemusnahan limbah hasil pengujian tidak dilakukan secara rutin	Netralisasi limbah dan penyimpanan di wadah tertutup rapat, disimpan di ruang sementara yang jauh dari gedung utama, dimonitor berkala	Fungsi Pengujian dan Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
15	Meningkatnya efektivitas KIE di Wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Pemahaman masyarakat terkait keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang belum merata	Pengelolaan data responden	Fungsi KIE
16	Meningkatnya efektivitas KIE di Wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Program Prioritas Nasional belum direplikasi oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPOM di Sofifi	1. Advokasi dan Koordinasi kepada Pemerintah Daerah 2. Rencana Aksi oleh Pemangku Kepentingan yang diintervensi	Fungsi KIE
17	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh izin Penerapan CPPOB tidak sesuai ketentuan, Tidak ada perbaikan terhadap sarana produksi agar sesuai standar CPPOB, Penanggung jawab sarana tidak dapat dihubungi (menghilang)	1. Melakukan monev progres pendampingan 2. Melakukan pendampingan UMKM	Fungsi Pemeriksaan
18	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Barang bukti tidak terpelihara	Perencanaan dan pengajuan permintaan pengadaan kepada tim PBJ	Fungsi Penindakan
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Terjadinya tuntutan balik oleh terduga pelaku kepada petugas penindakan	Penyusunan dokumen perkara dengan teliti dan tepat sasaran, verifikasi bertingkat terhadap dokumen	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Kegiatan intelijen tidak optimal	Peningkatan kompetensi dengan pembelajaran mandiri, dan berkoordinasi dengan UPT BPOM Lain dan Kedeputusan	Fungsi Penindakan
21	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang prima	Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik belum berkesinambungan	Menyusun perencanaan pelatihan pelayanan publik	Fungsi KIE dan Tata Usaha
22	Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal	Terdapat penyusunan klasifikasi dan hak akses arsip dinamis belum sesuai dengan pedoman	Sharing pedoman terkait penyusunan arsip dinamis kepada pengelola arsip di masing-masing fungsi	Tata Usaha
23	Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal	Pelatihan Manajemen Risiko terhadap tim SPI belum dilakukan secara berkesinambungan	1. Pembelajaran mandiri 2. Sosialisasi internal	Tata Usaha
24	Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal	Kondisi Alat Pengolah Data tidak tertelusur secara berkala	Perbaikan APD setelah dilaporkan	Tata Usaha
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal	Potensi Peluang dan Peluang Benturan kepentingan antara petugas pengelola pengadaan dengan penyedia/suplier pengadaan barang/jasa	1. Penggantian atau rolling petugas pengelola pengadaan barang/jasa secara berkala 2. Identifikasi Potensi Peluang dan Peluang Benturan Kepentingan	Tata Usaha
26	Terwujudnya tatakelola pemerintah Balai POM di Sofifi yang optimal	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak optimal	1. Penyusunan form identifikasi kebutuhan dengan menerapkan skala prioritas oleh masing-masing	Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko
			user/pengguna. 2. penyusunan spesifikasi barang jasa oleh masing-masing user/pengguna	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *pre* dan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Strategi Balai POM di Sofifi

Arah kebijakan dan strategi Balai POM di Sofifi disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah Maluku Utara. Penyesuaian ini dilakukan agar strategi Balai POM di Sofifi tidak hanya selaras dengan arah kebijakan BPOM 2025–2029 tetapi juga responsif terhadap isu spesifik di wilayah kerja, berikut merupakan matriks kombinasi strategi yang dihasilkan antara lain:

Tabel 3. 1 Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Sofifi 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre</i> dan <i>post-market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	• Penguatan pengawasan <i>pre</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis serta peningkatan kapasitas laboratorium pengujian di wilayah Maluku Utara. • Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan digital dan pelaporan masyarakat. • Peningkatan frekuensi pengawasan di wilayah terpencil dan kepulauan serta “wilayah lingkaran tangkang”. • Penguatan pengawasan produk impor yang masuk melalui pelabuhan dan bandara di wilayah Maluku Utara.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	• Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Terpadu. • Penegakan hukum berbasis bukti laboratorium dan penyelidikan bersama. • Penguatan mekanisme pelaporan cepat terhadap pelanggaran distribusi produk
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	• Pembinaan UMKM melalui sertifikasi dan pendampingan izin edar. • Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). • Kemitraan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, dan lembaga pendidikan vokasi
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan	• Memperluas jangkauan Kabupaten/Kota Pangan Aman melalui Pangan Jajanan Aman Sekolah, Desa Pangan Aman, serta Pasar pangan aman berbasis komunitas.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	- Pemanfaatan media lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan <i>awareness</i> keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. - Peningkatan literasi masyarakat dalam mengenali produk berisiko melalui gerakan “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa).
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan struktur organisasi dan fungsi pengawasan di seluruh kabupaten/kota.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, dan <i>sharing knowledge</i>.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	- Pemanfaatan sistem kerja berbasis kinerja dan data. - Peningkatan kualitas layanan publik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.

A. Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Balai POM di Sofifi akan mengarahkan strateginya untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, dengan pendekatan yang lebih proaktif dan digital. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada produk akhir, tetapi juga mencakup rantai pasok, distribusi, dan penjualan daring. Langkah-langkah strategis meliputi:

- Penguatan pengawasan *pre dan post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis serta peningkatan kapasitas laboratorium pengujian di wilayah Maluku Utara
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan digital dan pelaporan masyarakat.
- Peningkatan frekuensi pengawasan di wilayah terpencil, kepulauan, serta “wilayah lingkaran tambang”.
- Penguatan pengawasan produk impor yang masuk melalui pelabuhan dan bandara di wilayah Maluku Utara.

B. Pemberdayaan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Strategi Balai POM di Sofifi juga diarahkan untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha, terutama UMKM pangan olahan dan obat bahan alam. Pendampingan dan bimbingan teknis akan menjadi fokus utama agar pelaku usaha lokal mampu menghasilkan produk aman, bermutu, dan memenuhi standar nasional. Program prioritas meliputi:

- Pembinaan UMKM melalui sertifikasi dan pendampingan izin edar.
- Penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- Kemitraan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian/Perdagangan, dan lembaga pendidikan vokasi.

C. Penguatan Edukasi dan Literasi Publik

Balai POM di Sofifi akan memperluas jangkauan edukasi publik melalui kampanye keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih masif dan inklusif. Kebijakan diarahkan pada:

- Memperluas jangkauan Kabupaten/Kota Pangan Aman melalui Pangan Jajanan Aman Sekolah, Desa Pangan Aman, serta Pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pemanfaatan media lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan *awareness* keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Peningkatan literasi masyarakat dalam mengenali produk berisiko melalui gerakan “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa).

D. Penguatan Kolaborasi dan Penegakan Hukum

Dalam menghadapi maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal dan berbahaya dan pangan olahan tanpa izin edar, Balai POM di Sofifi akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Fokus kebijakan meliputi:

- Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Terpadu.
- Penegakan hukum berbasis bukti laboratorium dan penyelidikan bersama.

-
- Penguatan mekanisme pelaporan cepat terhadap pelanggaran distribusi produk.

E. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Untuk mendukung seluruh arah kebijakan, Balai POM di Sofifi berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM. Langkah-langkah strategis antara lain:

- Penguatan struktur organisasi dan fungsi pengawasan di seluruh kabupaten/kota.
- Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, dan *sharing knowledge*.
- Pemanfaatan sistem kerja berbasis kinerja dan data.
- Peningkatan kualitas layanan publik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Sofifi juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang mungkin memiliki risiko kesehatan berbeda atau akses terbatas terhadap informasi dan layanan. Dengan mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, lembaga pengawasan dapat menjamin bahwa informasi keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta mekanisme pengaduan dan edukasi publik, mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Sofifi melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang meliputi sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

a. Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Program ini memastikan regulasi, standar, dan kebijakan pengawasan berjalan seragam dan terarah di seluruh Indonesia.

b. Pemeriksaan dan Sampling Produk

Melalui inspeksi sarana serta pengambilan sampel rutin maupun terbatas, program ini mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sebelum produk bermasalah beredar luas.

c. Pengujian Laboratorium

Laboratorium Balai POM melakukan pengujian keamanan, mutu, dan gizi yang menjadi dasar ilmiah untuk setiap keputusan pengawasan dan tindak lanjut hukum.

d. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Meningkatkan literasi masyarakat agar lebih cerdas memilih produk yang aman, sekaligus memperkuat peran komunitas sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.

e. Pemberdayaan Pelaku Usaha

Program ini membantu industri terutama UMKM memahami standar keamanan produk dan memenuhi persyaratan produksi sehingga tercipta rantai pasok yang lebih aman.

f. Penindakan dan Intelijen Obat dan Makanan

Melakukan operasi, penelusuran, dan penindakan terhadap pelanggaran serius seperti produk ilegal, palsu, atau mengandung bahan berbahaya bekerja sama dengan lintas sektor.

g. Transformasi Digital Pengawasan

Berbagai aplikasi dan sistem informasi terintegrasi mempermudah pelaksanaan pengawasan, meningkatkan transparansi data, serta mempercepat respons terhadap risiko.

h. Penguatan SDM dan Tata Kelola

Melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta penguatan manajemen internal, program ini memastikan pengawas memiliki kapasitas yang memadai dan tata kelola berjalan efektif.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

a. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Operasional

Meliputi perawatan rutin, perbaikan gedung, ruang kerja, ruang pelayanan publik, serta seluruh fasilitas pendukung untuk memastikan kelayakan operasional, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kerja.

b. Pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Pengujian

Kalibrasi alat, pemeliharaan berkala, penggantian peralatan yang rusak, serta peningkatan sarana laboratorium guna menjamin keandalan operasional dan mutu hasil pengujian.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi, meliputi pengadaan peralatan laboratorium, perangkat TIK, furnitur, dan perlengkapan kerja lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Meliputi pencatatan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan ketertiban administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM serta mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai POM di Sofifi menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Target Kinerja Balai POM di Sofifi 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25	84.75	86.25	87.75	89.25
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi	100	100	100	100	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89	90	91	92	93

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	94.75	95.75	96.75	97.50
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	89.20	90.40	91.80	93.20
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	91	92	93	94
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	56	60	63	66	69

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	12,50	12,50	25	25	62,50
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	88.61	89.49	90.38	91.26	92.15
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	10	12	14	15
	Jumlah desa pangan aman	3	6	6	6	6
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	2	2	2
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.33	28.89	46.67	66.67	88.89
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi	91	91	92	93	94

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	4,55	4,60	4,65	4,70	4,75
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi	85	85,5	86,5	87,5	88,5
	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,84	80,84	81,54	82,54	83,84
	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi	2,85	3,4	3,7	4	4,2

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Sofifi periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Sofifi 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 5.503,2	Rp 17.902,6	Rp 21.581,3	Rp 24.365,8	Rp 27.555,1
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 6.003,7	Rp 6.005,7	Rp 6.379,1	Rp 7.017,6	Rp 7.720
TOTAL	Rp 11.506,9	Rp 23.908,3	Rp 27.960,4	Rp 31.383,4	Rp 35.275,1

Tabel 4. 3 Kerangka Alokasi berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	Rp 11.506,9	Rp 23.908,3	Rp 27.960,4	Rp 31.383,4	Rp 35.275,1
TOTAL	Rp 11.506,9	Rp 23.908,3	Rp 27.960,4	Rp 31.383,4	Rp 35.275,1

Pendanaan Balai POM di Sofifi bersumber dari Rupiah Murni APBN (RM) dan belum memberlakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan tetapi Balai POM di Sofifi berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi nyata pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam rencana strategis Balai POM di Sofifi 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2025- 2029 sebagai *impact assessment*.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai POM di Sofifi 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Maluku Utara yang selaras dengan Rencana Strategis Badan POM 2025- 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di Balai POM di Sofifi baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sampai pada level individu.

Kepala Balai POM di Sofifi



Ermanto Siahaan

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Sofifi			Maluku Utara						Rp 11.506,9	Rp 23.908,3	Rp 27.960,4	Rp 31.383,4	Rp 35.275,1	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Balai POM di Sofifi						Rp 5.503,2	Rp 17.902,6	Rp 21.581,3	Rp 24.365,8	Rp 27.555,1	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		83.25	84.75	86.25	87.75	89.25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	86	88						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Sofifi		100	100	100	100	100						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		89	90	91	92	93						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	83	85	87	90						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.50	94.75	95.75	96.75	97.50						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		88	89.20	90.40	91.80	93.20						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilaya kerja Balai POM di Sofifi		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		56	60	63	66	69						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		12,50	12,50	25	25	62,50						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	47	49	51	52						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			59	59	85	85	85						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			267	269	284	298	316						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			20	22	24	26	28						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			139	156	167	180	194						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			144	144	144	144	144						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	293	293	293	293						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		88.61	89.49	90.38	91.26	92.15						UPT BPOM
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		8	10	12	14	15						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Jumlah desa pangan aman		3	6	6	6	6						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	2	2	2						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			339	343	378	415	457						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			37	14	16	18	19						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			8	10	12	14	15						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman			3	6	6	6	6						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	2	2	2						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		13.33	28.89	46.67	66.67	88.89						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			7	8	9	10	11						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi		91	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			2	2	2	2	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang Prima		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi		4,55	4,60	4,65	4,70	4,75						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			15	22	34	45	52						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Balai POM di Sofifi											UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi		85	85,5	86,5	87,5	88,5						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi		79,84	80,84	81,54	82,54	83,84						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi		2,85	3,4	3,7	4	4,2						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4



Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		10	10	10	10	10						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								Rp 6.003,7	Rp 6.005,7	Rp 6.379,1	Rp 7.017,6	Rp 7.720	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						UPT BPOM